

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sejarah Indonesia mencatat bahwa perpindahan dari masa rezim orde baru ke masa reformasi sering kali menarik untuk dikaji lebih dalam. Dimana perpindahan dari system yang sentralis menjadi system desentralisasi, ditandai dengan di tetapkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi adalah penyerahan Kekuasaan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Pengertian ini sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014.

Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan Pemerintah Daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah, kewenangan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki daerah secara efisien dan efektif, dan meningkatkan kinerja keuangan daerah. Otonomi daerah menciptakan kemandirian untuk membangun daerah secara optimal dan tidak lagi terkonsentrasi di pusat sehingga meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik, mengoptimalkan potensi pendapatan daerah serta memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor yang produktif di daerah. (Adyatma & Oktaviani, 2015:190).

Menurut Mardiasmo (2018:11), “Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilakukan dengan memberikan kewenangan atau diskresi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara

proporsional. Artinya, pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”.

Salah satu tujuan Pemerintah adalah untuk mensejahterakan rakyatnya, untuk itu pemerintah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan cara mempertahankan kemampuan keuangan negara yang bersumber dari pendapatan asli daerah dan sumber lainnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Jika dilihat dari Laporan dan Realisasi Anggaran (LRA) yang disusun oleh beberapa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota, menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang bersumber dari daerahnya belum bisa menutupi APBD daerahnya, sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut pemerintah Kabupaten/kota mengandalkan dana transferan baik dana transferan dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Realita yang terjadi sekarang adalah kontribusi dana perimbangan daerah pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sangat tidak proporsional. Artinya bahwa pemerintah pusat mendanai daerah dalam jumlah yang besar dibanding kemandirian pemerintah daerah itu sendiri dalam membiayai pembangunan dan belanjanya. Berdasarkan data yang dirilis dalam Budget in Brief 2016 oleh Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan RI tahun 2016 menyatakan bahwa dana perimbangan pusat mendominasi jumlah pendapatan yang diperoleh daerah selama tahun 2016 adalah sebesar 64 %. (Lisnawati, 2018:1251).

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, ketergantungan daerah terhadap Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) masih sangat tinggi. Secara rata-rata nasional, ketergantungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) terhadap TKDD sebesar 80,1%. Sementara, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar 12,87%.

Di provinsi Jawa Barat, pada tahun 2014-2017 rata-rata Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKDD) mengalami peningkatan tetapi masih dalam kategori rendah atau dengan pola hubungan konsultatif. Walaupun rata-rata kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota meningkat setiap tahunnya, tetapi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang sudah dinyatakan sebagai daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi masih sedikit dibandingkan dengan daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang rendah atau bahkan sangat rendah selama kurun waktu 2014-2017.

Setelah berjalan sekitar 10 tahun, UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ternyata menimbulkan beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya. Permasalahan otonomi daerah cenderung kurang maksimal, berjalan sendiri, dan kurang koordinasi. Dalam pelaksanaannya pemerintah pusat terlalu memberikan kewenangan yang terlalu luas kepada daerah, namun dalam kenyataannya tidak semua kompeten dalam mengemban amanah tersebut. Dimana pemerintah pusat harus mengkoordinir 514 pemerintahan kota/kabupaten, sehingga banyak urusan yang kacau. Persoalan tersebut membuat pemerintahaan pusat seperti penuh lorong yang berliku seperti labirin. Selain itu permasalahan yang lainnya berkaitan dengan desentralisasi dan otonomi daerah adalah adanya

raja-raja kecil di pemerintah daerah. Sehingga menyebabkan sulit dalam koordinasi, yang mengakibatkan pembangunan yang ada di pemerintahan daerah tidak sejalan dengan pemerintahan pusat. Disisi lain kurangnya loyalitas terhadap tugas yang dijalankan juga mempengaruhi kondisi tersebut.

Tepatnya pada tanggal 30 September 2014, Presiden Republik Indonesia telah menandatangani Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 yang dianggap sudah tidak lagi sejalan dengan keadaan, perkembangan zaman, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disini dibagi kedalam urusan pembagian antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Urusan pemerintah wajib dibagi kedalam urusan pemerintah wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan pelayanan tidak terkait pelayanan dasar. Untuk urusan pemerintah wajib yang terkait pelayanan dasar dibuatkan Standar Pelayanan Dasar (SPM) untuk menjamin hak masyarakat konstitusional. Sementara pembagian urusan pemerintah konkuren antara daerah provinsi dengan kabupaten/kota walaupun urusan pemerintah sama, perbedaannya akan nampak dari pembagian dan ruang lingkup urusan pemerintah tersebut. Jadi nantinya akan dibagi kedalam tiga yaitu urusan pemerintah umum yang dipegang oleh presiden, urusan pemerintah absolute, dan urusan pemerintah konkuren.

Hal yang menarik terdapat perubahan pembagian dalam urusan pengelolaan bidang pendidikan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Dimana pengelolaan kewenangan Pendidikan menengah

SMA/SMK yang semula berada di bawah pemerintah kabupaten/kota dalam pengurusannya dialihkan ke pemerintah provinsi. Tujuan dari pengalihan ini tentunya agar pemerintah kabupaten/kota fokus pada membenahan pendidikan menengah SMP dan pendidikan dasar. Hal ini tentunya menjadi angin segar bagi pemerintahan kabupaten/kota agar terus fokus pada pengembangan daerah. Sehingga diharapkan dapat bekerja dengan optimal serta maksimal dalam pembangunan. Serta dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah agar lebih mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan tentunya.

Disamping itu penerapan kebijakan ini dipengaruhi juga dengan jumlah beban belanja pegawai yang membengkak, dimana berpengaruh terhadap APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang menyedot anggaran terlalu besar. Ada beberapa daerah yang tanggungan belanja pegawai lebih dari 50% dari total APBD. Hal ini berakibat dana yang seharusnya untuk pembangunan malah terserap untuk menanggung beban belanja pegawai yang semakin membesar. Hal ini tidak diimbangi dengan alokasi dana perimbangan yang sama setiap tahunnya. Sehingga menggerogoti anggaran untuk alokasi yang lainnya.

Menurut riset dari beritagar.id yang dimuat dalam bengkulutoday.com pada tahun 2018 kota Bengkulu menjadi kota dengan persentase alokasi belanja pegawai terbesar dengan angka sebesar 55,8 %. Di Jawa Barat sendiri pada tahun tersebut ada tiga kabupaten yang masuk dalam 10 kabupaten/kota dengan persentasi belanja pegawai tertinggi tahun 2018 yaitu Kabupaten Sumedang sebesar 55,3%, Kabupaten Kuningan 53,9% dan Kabupaten Ciamis sebesar 53,3%.

Tabel 1.1
Data Belanja Pegawai Terbesar Tahun 2018



Sumber: *bengkulutoday.com*

Sementara pada tahun 2012 bahkan beberapa daerah menyentuh diatas 70% porsi belanja pegawai, terbesar di tempati oleh Kota Langsa 76,7% dan kedua oleh Kabupaten Kuningan 74,0 %. Dengan demikian dapat kita simpulkan sebagian daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia beban belanja pegawai terlalu besar yang berimbas pada porsi anggaran yang lain mengecil. Sehingga tujuan untuk mensejahterakan masyarakat tentunya terhambat. Sementara menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan belanja pegawai tidak boleh lebih dari 50% dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Karena menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani apabila anggaran belanja pegawai lebih dari 50% total

APBD tidak efisien dalam mensejahterakan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Di Jawa Barat sendiri terdapat 27 kabupaten/kota yang terdampak oleh penetapan undang-undang tersebut. Dari berita okezonnews.com Ahmad Heryawan selaku Gubernur Jawa Barat mengatakan, "Untuk pengalihan kewenangan ini berakibat 28 ribu PNS pindah ke provinsi, ini jadi 2 kali lipat lebih kan, PNS Jabar kan asalnya 13.400 orang sekarang ditambah 28 ribu jadi 41.400 orang.". Jelas dengan kondisi tersebut beban belanja pegawai yang ditanggung oleh provinsi tentunya menjadi sangat besar dimana hampir 200% dari keadaan semula.

Dari data Laporan Realisasi Anggaran pada 2016-2017 terlihat bagaimana perbedaan setelah UU No. 23 Tahun 2014 tersebut di terapkan dimana bisa kita melihat perbedaannya antara sebelum dan sesudah penerapan tersebut.

Tabel 1.2
Belanja Pegawai Seluruh Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016

(dalam ribuan rupiah)

No	Belanja Pegawai	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Pegawai Tidak Langsung	36.200.687.554,086	32.553.659.824,28
2	Belanja Pegawai Langsung	3.837.501.989,80	3.735.033.625,775

Sumber: www.djpk.go.id

Dilihat dari tabel diatas seluruh kabupaten dan kota yang ada di provinsi Jawa Barat mempunyai beban anggaran untuk belanja pegawai yang cukup besar. Sementara penyerapan anggaran untuk belanja pegawai cenderung kurang maksimal sehingga dapat dikatakan efektif untuk tahun anggaran tersebut.

Tabel 1.3
Belanja Pegawai Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

(dalam ribuan rupiah)

No	Belanja Pegawai	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Pegawai Tidak Langsung	2.104.513.144,638	1.835.034.492,25
2	Belanja Pegawai Langsung	271.904.077,430	223.811.835,84

Sumber: www.djpk.go.id

Dilihat dari tabel diatas untuk pemerintahan provinsi Jawa Barat penyerapan anggaran mendekati dari anggaran yang telah ditetapkan sehingga dapat dikatakan efektif untuk anggaran tahun tersebut.

Tabel 1.4
Belanja Pegawai Seluruh Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

(dalam ribuan rupiah)

No	Belanja Pegawai	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Pegawai Tidak Langsung	33.142.320.224,806	30.907.244.269,32
2	Belanja Pegawai Langsung	4.242.544.504,179	4.867.596.334,51

Sumber: www.djpk.go.id

Dilihat dari tabel diatas belanja pegawai untuk seluruh kabupaten dan kota mengalami penurunan. Dan untuk penyerapan anggaran cukup maksimal dan dapat dikatakan efektif untuk tahun anggaran tersebut.

Tabel 1.5
Belanja Pegawai Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

(dalam ribuan rupiah)

No	Belanja Pegawai	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Pegawai Tidak Langsung	5.054.514.042,136	5.152.653.055,07
2	Belanja Pegawai Langsung	287.984.627,354	281.793.512,58

Sumber: www.djpk.go.id

Dilihat dari tabel diatas untuk belanja pegawai mengalami kenaikan dua kali lipat dari tahun anggran sebelumnya. Hal ini imbas dari di tetapkannya UU No. 23 Tahun 2014. Semntara untuk penyerapan anggaran untuk tahun 2017 melebihi anggaran yang telah di anggarkan.

Dari data yang ada bahwa belanja pegawai sebelum dan sesudah setelah adanya penerapan UU No.23 Tahun 2014 pengelolaan guru SMA/SMK yang semula berada di tangan pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah provinsi terlihat perbedaan jumlah yang signifikan yang harus di tanggung oleh Pemprov Jawa Barat dimana untuk tahun anggaran 2016 sebsar Rp. 1.835.034.492,250,- melonja menjadi Rp. 5.152.653.055,070,-. Hal ini tentunya berdampak pada porsi anggaran yang ada di provinsi, karena yang ditanggung oleh dana perimbangan hanya pegawai yang satusnya sudah PNS (Pegawai Negeri Sipil) sementara yang honorer harus mengambil dari alokasi yang lainnya. Yang dampaknya berimbas kepada beberapa SKPD untuk anggarannya ada yang dikurangi.

Dengan adanya kondisi diatas maka sudah seharusnya adanya upaya-upaya agar anggaran yang dibuat ditujukan untuk pembangunan sehingga kemandirian keuangan daerah dapat tercapai. APBD sendiri harus dirancang agar dapat memberikan manfaat untuk masyarakat luas, serta menerapkan tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomis,efisiensi dan efektivitas. Untuk menganalisis rasio keuangan yaitu dapat dengan membandingkan periode sekarang dengan periode sebelumnya untuk mengetahui kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat membandingkan dengan daerah terdekat yang relatif sama untuk dilihat

bagaimana rasio keuangannya. Adapun rasio yang dapat dianalisa terhadap belanja pegawai adalah Rasio Efektivitas yaitu perbandingan antara realisasi belanja pegawai dengan target belanja pegawai tahun bersangkutan. Sehingga kita dapat menyimpulkan apakah pada tahun anggaran tersebut belanja pegawai berjalan dengan efektif atau tidak efektif dan juga pengaruhnya terhadap kemandirian keuangan daerah. Sementara Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan Dana Transferan pusat/provinsi dan pinjaman. Sehingga akan menghasilkan rasio kemandirian yang menggambarkan kondisi daerah tersebut.

Dengan penerapan pengelolaan kewenangan guru SMA/SMK yang semula berada di bawah kabupaten/kota beralih ke tingkat Provinsi apakah langkah tersebut lebih efektif atau tidak efektif serta dampaknya terhadap kemandirian keuangan daerah. Dengan adanya fenomena tersebut menarik untuk penulis melakukan penelitian untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah ditetapkan berjalan dengan baik dan memberikan pengaruh yang positif.

Penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Analisis Efektivitas Belanja Pegawai Sebelum dan Sesudah Penerapan UU No. 23 Tahun 2014 serta Dampaknya Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan didukung penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Dori Saputra (2014) meneliti mengenai Analisis Kemandirian Daerah dan Efektivitas keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat. Program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Hasil penelitian, Rasio kemandirian keuangan daerah secara rata-rata

berada pada 6,5% dengan kategori rendah sekali dari tahun 2004-2011. Rasio Efektivitas PAD secara rata-rata berada pada kecenderungan sebesar 109,8% dengan kategori sangat efektif dari tahun 2004-2011. Trend kemandirian keuangan daerah secara rata-rata berada pada kecenderungan 95,3% dari tahun 2005-2011. Dan trend efektivitas keuangan daerah secara rata-rata berada pada kecenderungan 116,2% dari tahun 2005-2011.

2. Nunik Retno Herawati (2017) meneliti mengenai Analisis Politik Alih Kewenangan Pengelolaan Guru SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi. Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Diponegoro. Hasil Penelitian yaitu, Resentralisasi otoritas pendidikan tinggi, terutama manajemen guru di tingkat Pemerintah Provinsi, dapat meminimalkan terjadinya politisasi pendidikan di tingkat Kabupaten / Kota.
3. Pandu Cahya Nugraha (2017) meneliti mengenai Analisa Index Perhitungan Ratio Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta Tahun 2007-2011. Jurusan Akuntansi, Universitas Mercubuana Yogyakarta. Hasil Penelitian yaitu Menunjukkan tingkat kemampuan daerah mengelola APBD masih tergolong rendah sekali atau masih dalam skala instruktif. Untuk periode pengelolaan APBD yang paling baik berdasarkan index perbandingan adalah tahun 2010, sementara periode pengelolaan APBD yang paling buruk berdasarkan index perbandingan adalah tahun 2009.
4. Imanuel Pengkey dan Sherly Pinatik (2015) meneliti mengenai Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Hasil Penelitian yaitu Tingkat efektivitas pada tahun 2010-2014 keseluruhannya tidak efektif dan tingkat efisiensi dari tahun 2010-2014 keseluruhannya tidak efisien. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi sebaiknya meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran belanja, dibutuhkan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah maupun swasta serta masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan, program kegiatan maupun perencanaan anggaran.

5. Erstelita Tria Ramadhani Darwis (2018) meneliti mengenai Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Kemandirian Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Hasil Penelitian yaitu menunjukkan bahwa belanja modal (X1) berpengaruh signifikan negative terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (Y), dimana nilai signifikansi 0,005 lebih kecil dari alpha 0,05 atau nilai thitung > ttabel yaitu $2,903 > 1,986$ serta nilai β negatif. Belanja pegawai berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (Y), dimana nilai signifikansi 0,012 lebih kecil dari alpha 0,05 dan nilai thitung > ttabel yaitu $2,552 > 1,986$, nilai β negatif.
6. Ahmad Burhanudin (2012) meneliti mengenai Pengaruh Belanja Pegawai, Investasi Pemerintah, Pembayaran Utang Pemerintah Terhadap Fenomena Flypaper Effect. Hasil Penelitian yaitu Belanja Pegawai mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap flypaper effect. Sedangkan Investasi Pemerintah Daerah dan Pembayaran Utang Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap flypaper effect.

7. Ariel Sahorn Sumenge (2013) meneliti mengenai Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pemabangunan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil penelitian yaitu tingkat dan kriteria efektifitas pelaksanaan anggaran belanja BAPPEDA Minahasa Selatan tahun 2008 – 2012 sangat bervariasi. Tingkat efektifitas tertinggi terjadi pada 2010 dan yang terendah terjadi pada 2011. Pelaksanaan anggaran belanja tahun 2008, 2009, 2010 dan 2012 dikatakan efektif, tetapi pada tahun 2011 tingkat efektifitasnya masih kurang karena realisasi anggaran belanja memiliki perbedaan yang jauh dengan target anggaran belanja.
8. Puthut Eko Pranomo, Hery Sunaryanto, dan Benardin (2009) meneliti mengenai Analisis APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2002-2006. Hasil penelitian yaitu PAD Propinsi Bengkulu dengan perbandingan antara target dan realisasi rata-rata sebesar 111,79% menunjukkan tingkat sangat efektif, demikian pula dengan target dan realisasi APBD rata-rata 102,75% menunjukkan bahwa administrasi pengelolaan APBD Propinsi Bengkulu sangat efektif.
9. Imam Prasetyo (2017) meneliti mengenai Implementasi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan SMA/SMK Ke Provinsi (Studi Kasus Di Kota Blitar). Hasil penelitian yaitu analisa penelitian ini menggunakan teori Grindle yang bahwa keberhasilan sebuah implementasi kebijakan dilihat dari dua faktor yaitu isi dan lingkungan implementasi. Sehingga, implementasi pengelolaan SMA/SMK di Kota Blitar belum

teralisasi dengan baik hal ini disebabkan karena beberapa hambatan yang terjadi di Kota Blitar. Diharapkan dengan peraturan ini tidak berdampak negatif bagi anak didik di Kota Blitar dalam menuntut ilmu.

10. Joao Amaral dan Luh Putu Wiagustini (2019) Meneliti mengenai Efektivitas Penyerapan Anggaran Pada *Ministerio Obras Piblicas* Timor Leste. Hasil penelitian menunjukkan Rata-rata Efektifitas anggaran dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sebesar 89,29% dengan tingkat persentase 80% s/d 90% atau terkategori sangat Cukup Efektifitas. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan ditinjau dari penyerapan anggaran *Ministério das Obras Públicas* Timor Leste tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 baik.
11. Reza Marizka (2013) Meneliti mengenai “Pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah” pada kabupaten dan kota di Sumatera Barat tahun 2006-2011. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dana bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
12. Konstatinus Pati Sanga, Suwardi Bambang Hermanto, Nur Handayani (2018) meneliti mengenai “Pengaruh Penerimaan Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening”.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli daerah dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, Belanja modal berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, dan Belanja Modal tidak memediasi pengaruh Pendapatan asli daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

13. Ramona Leny Gaghana, Paulus Kindangen, Debby Ch. Rotinsulu (2018) meneliti mengenai “Pengaruh Pertumbuhan ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah” Studi Kasus Pada Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon dan Kota Kotamobagu. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara bersama-sama pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Sulawesi Utara.
14. Febby Randria Ramadhani (2016) Meneliti mengenai “Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah” di Kota Tarakan tahun 2010-2015. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Rasio kemandirian keuangan daerah Kota Tarakan tahun 2010-2015 secara rata-rata berada pada

1,59% dengan kategori rendah sekali; Rasio Efektivitas keuangan daerah Kota Tarakan tahun 2010-2015 secara rata-rata berada pada kecenderungan 92% dengan kategori efektif; Trend Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan trend positif dengan kecenderungan meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2020; Trend efektivitas keuangan daerah menunjukkan trend positif dengan kecenderungan meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2020.

15. Ayu Pratiwi, Siti Nurlaela, Yuli Chomsatu (2018) Meneliti Mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Dana Pegawai Terhadap Belanja Modal Kota Surakarta. Hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa personel Pengeluaran berpengaruh negatif, Pendapatan Asli Daerah, dan Hibah Tujuan Umum berpengaruh terhadap modal pengeluaran. Sedangkan Hibah Tujuan Khusus dan Dana Bersama tidak berpengaruh pada belanja modal. Untuk Pemerintah Kota Surakarta diharapkan untuk lebih memilih sumber alokasi pemerintah daerahn pendapatan dan pengeluaran lokal sendiri diharapkan akan diutamakan dalam alokasi modal pengeluaran lebih efektif untuk meningkatkan layanan kepada public.
16. Dwi Purnamasari dan Isnaini Rodiyah (2017) meneliti mengenai Analisis Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa, rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo yang berstatus masih rendah atau berada pada pola hubungan konsultatif. Rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio indeks kemampuan rutin yang menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang cukup. Pada rasio keserasian menunjukan

hasil belanja rutin lebih besar dari belanja pembangunan. Sedangkan rasio pertumbuhan, secara keseluruhan mengalami pertumbuhan yang negatif. Kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Sidoarjo masih rendah atau kurang.

17. Junita Putri R.H dan Murni D.N (2017) Meneliti mengenai Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Pada Kinerja Pemerintah Kota Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah kota Medan telah sangat independen dan sangat efektif dalam kinerja manajemen keuangan dan menjalankan roda pemerintah.
18. Aris Rante, Muhamad Saleh Mire dan Ardi Paminto (2017) meneliti mengenai Analisis Kemandirian Keuangan Daerah. Analisis tersebut menemukan bahwa: Efek langsung langsung Shop tidak signifikan terhadap PDB. Belanja Dampak langsung tidak langsung secara signifikan terhadap PDB. Efek langsung Pemerintah Daerah secara langsung tidak signifikan terhadap PDB. Belanja Langsung dan Pengeluaran Tidak Langsung berdampak langsung secara signifikan pada Tingkat Desentralisasi Fiskal Efek Bersifat Ekuitas Daerah secara langsung tidak signifikan terhadap PDB Tingkat Desentralisasi Fiskal dan dampak langsung tidak signifikan terhadap tingkat Desentralisasi Fiskal di Malinau.
19. R. Neneng Rina A dan Nisa Noor Wahid (2018) meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa: (1) Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan

Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalami fluktuasi, (2) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, (3) Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, (4) Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

20. Jalu A. Prakoso, Fitrah Sari Islami dan Rr. Retno Sugiharti (2019) Meneliti mengenai Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Jawa Tengah. Hasil analisis menyebutkan bahwa rasio kemampuan keuangan daerah sebagian besar berada dalam posisi sangat kurang dan hasil rasio kemandirian keuangan daerah sebagian berada dalam kondisi instruktif.

Tabel 1.6
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Penerbit
1.	Dori Saputra (2014) Judul Penelitian : Analisis Kemandirian Daerah dan Efektivitas keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat	Variable Independen : Rasio Efektivitas, Rasio Kemandirian Daerah	Variable Independen: Trend Kemandirian Daerah.	Rasio kemandirian keuangan daerah secara rata-rata berada pada 6,5% dengan kategori rendah sekali dari tahun 2004-2011. 2. Rasio Efektivitas PAD secara rata-rata berada pada kecendrungan sebesar 109,8% dengan kategori sangat efektif dari tahun 2004-2011. 3. Trend kemandirian keuangan daerah secara rata-rata berada pada	Jurnal ISSN Vol. 2 No. 1 Tahun 2014. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.

				kecenderungan 95,3% dari tahun 2005-2011. 4. Trend efektivitas keuangan daerah secara rata-rata berada pada kecenderungan 116,2% dari tahun 2005-2011.	
2.	Nunik Retno Herawati (2017) Judul Penelitian Analisis Politik Alih Kewenangan Pengelolaan Guru SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi.	Membahas Pengaruh ditetapkannya UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Analisi Deskriptif menggunakan perspektif politik	Resentralisas otoritas pendidikan tinggi, terutama manajemen guru di tingkat Pemerintah Provinsi, dapat meminimalkan terjadinya politisasi pendidikan di tingkat Kabupaten / Kota	Jurnal Ilmu Sosial Vol.16 No. 2 2017 hal 72-93
3	Pandu Cahya Nugraha (2017) Judul Penelitian : Analisa Index Perhitungan Ratio Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta Tahun 2007-2011	Variable Independen : Rasio Efektifitas, Kemandirian Daerah	Variable Independen : Index Rasio APBD, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan.	Menunjukkan tingkat kemampuan daerah mengelola APBD masih tergolong rendah sekali atau masih dalam skala instruktif. Untuk periode pengelolaan APBD yang paling baik berdasarkan index perbandingan adalah tahun 2010, sementara periode pengelolaan APBD yang paling buruk berdasarkan index perbandingan adalah tahun 2009.	Jurnal Perilaku dan Strategi Bisnis Vol.5 No.1, 2017 Hal. 94-108
4	Immanuel Pengkey dan Sherly Pinatik (2015) Judul Penelitian: Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi	Variable Independen : Rasio Efektivitas	Variable Independen : Rasio Efisiensi	Tingkat efektivitas pada tahun 2010-2014 keseluruhannya tidak efektif dan tingkat efisiensi dari tahun 2010-2014 keseluruhannya tidak efisien. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi sebaiknya meningkatkan	Jurnal ISSN : 2303-1174 Jurnal EMBA Vol.3 No.4 2015 ,

	Sulawesi Utara.			efektivitas dan efisiensi anggaran belanja, dibutuhkan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah maupun swasta serta masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan, program kegiatan maupun perencanaan anggaran.	
5.	Erstelita Tria Ramadhani Darwis (2018) Judul Penelitian: Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Kemandirian Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat	Variabel Independen: Belanja Pegawai, Kemandirian Daerah	Variabel Independen: Belanja Modal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Belanja pegawai berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (Y), dimana nilai signifikansi 0,012 lebih kecil dari alpha 0,05 dan nilai thitung > ttabel yaitu $2,552 > 1,986$, nilai β negatif.	Jurnal ISSN Program studi akuntansi Fakultas ekonomi Universitas Negeri Padang
6	Ahmad Burhanudin (2012) Judul Penelitian: Pengaruh Belanja Pegawai, Investasi Pemerintah, Pembayaran Utang Pemerintah Terhadap Fenomena Flypaper Effect	Variable Independen : Belanja Pegawai	Variable Independen : Investasi Pemerintah, Pembayaran Utang Pemerintah.	Hasil dari penelitian ini Belanja Pegawai mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap flypaper effect. Sedangkan Investasi Pemerintah Daerah dan Pembayaran Utang Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap flypaper effect.	Jurnal ISSN: 2252-6765 Accounting Analysis Journal Vol.1 No.1 2012
7	Ariel Sahorn Sumenge (2013) Judul Penelitian: Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pemabangunan	Variable Independen: Rasio Efektivitas	Variable Independen: Rasio Efisiensi	Tingkat dan kriteria efektivitas pelaksanaan anggaran belanja BAPPEDA Minahasa Selatan tahun 2008 – 2012 sangat bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada 2010	Jurnal ISSN: 2303-1174 Jurnal EMBA Vol.1 No.3 2013, Hal 74-81

	Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.				dan yang terendah terjadi pada 2011. Pelaksanaan anggaran belanja tahun 2008, 2009, 2010 dan 2012 dikatakan efektif, tetapi pada tahun 2011 tingkat efektifitasnya masih kurang karena realisasi anggaran belanja memiliki perbedaan yang jauh dengan target anggaran belanja.	
8	Puthut Eko Pranomo, Hery Sunaryanto, dan Bernardin (2009) Judul Penelitian: Analisis APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2002-2006	Variable Independen : Rasio Efektivitas, Rasio Kemandirian Daerah	Variable Independen : Rasio Efisiensi.	1. PAD Propinsi Bengkulu dengan perbandingan antara target dan realisasi rata-rata sebesar 111,79% menunjukkan tingkat sangat efektif, demikian pula dengan target dan realisasi APBD ratarata 102,75% menunjukkan bahwa administrasi pengelolaan APBD Propinsi Bengkulu sangat efektif.	Jurnal ISSN : 1979-7338 Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembanguna n Vol.2 No.1 2009, Hal 18-25	
9	Imam Prasetyo (2017) Judul Penelitian : Implementasi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan SMA/SMK Ke Provinsi (Studi Kasus Di Kota Blitar)	Membahas Pemindahan alih kewenangan guru SMA/SMK dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Provinsi	Menggunakan anlisis deskriptif pendekatan kualitatif.	Hasil analisa penelitian ini menggunakan teori Grindle yang bahwa keberhasilan sebuah implementasi kebijakan dilihat dari dua faktor yaitu isi dan lingkungan implementasi. Sehingga, implementasi pengelolaan SMA/SMK di Kota Blitar belum terrealisasi dengan baik hal ini	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jurusan Filsafat Politik Islam.	

				disebabkan karena beberapa hambatan yang terjadi di Kota Blitar. Diharapkan dengan peraturan ini tidak berdampak negatif bagi anak didik di Kota Blitar dalam menuntut ilmu.	
10	Reza Marizka 2013 Pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Sumatera Barat (tahun 2006-2011)	Variabel Independen: Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel Independen: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus	Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuanan daerah, dana bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Akuntansi Volume 1, No. 3 Artikel Ilmiah Universitas Padang
11	Joao Amaral dan Luh Putu Wiagustini (2019) Judul Penelitian: Efektivitas Penyerapan Anggaran Pada <i>Ministerio Das Obras Publicas</i> Timor Leste	Variabel Independen: Efektivitas	Variabel independen: Penyerapan Anggaran	Hasil penelitian menunjukkan Rata-rata Efektifitas anggaran dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sebesar 89,29% dengan tingkat persentase 80% s/d 90% atau terkategori sangat Cukup Efektifitas. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan ditinjau dari penyerapan anggaran <i>Ministério das Obras Públicas</i> Timor Leste tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 baik.	Jurnal ISSN 2337-3067 E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Vol.8.2 (2019) Hal.95-136

12	Konstanti nus Pati Sanga, Suwardi Bambang Hermanto, Nur Handayani 2018 Pengaruh Penerimaan Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening	Variable Independen: Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel Independen: Penerimaan, Belanja Modal	Pendapatan Asli daerah dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, Belanja modal berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, dan Belanja Modal tidak memediasi pengaruh Pendapatan asli daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	Jurnal ISSN Konferensi Regional Akuntansi V, Malang
13	Ramona Leny Gaghana, Paulus Kindangen, Debby Ch. Rotinsulu 2018 Pengaruh Pertumbuhan ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kota Manado, Kota Bitung, Kota	Variabel Independen: Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi, PAD	Pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara bersama-sama pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang	Jurnal ISSN 2685-3183 Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol. 19 No. 7

	Tomohon Dan Kota Kotamobagu)			signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Sulawesi Utara	
14	Febby Randria Ramadhani 2016 Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah di Kota Tarakan tahun 2010-2015	Variabel Independen: Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas keuangan Daerah	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah	- Rasio kemandirian keuangan daerah Kota Tarakan tahun 2010-2015 secara rata-rata berada pada 1,59% dengan kategori rendah sekali; - Rasio Efektivitas keuangan daerah Kota Tarakan tahun 2010-2015 secara rata-rata berada pada kecenderungan 92% dengan kategori efektif; - Trend Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan trend positif dengan kecenderungan meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2020; - Trend efektivitas keuangan daerah menunjukkan trend positif dengan kecenderungan meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2020.	Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 14 No. 01 Universitas Muhammadiyah Malang ISSN 1693-2595
15	Ayu Pratiwi, Siti Nurlaela, Yuli Chomsatu (2018) Judul Penelitian: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Dana Pegawai Terhadap Belanja Modal Kota Surakarta.	Variabel Independen: Belanja Pegawai	Variabel Independen: PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa personel Pengeluaran berpengaruh negatif, Pendapatan Asli Daerah, dan Hibah Tujuan Umum berpengaruh terhadap modal pengeluaran. Sedangkan Hibah Tujuan Khusus dan Dana Bersama tidak	Jurnal ISSN 1693-0827 Jurnal Ekonomi Pradigma Vol. 19 No. 02 Agustus 2017-Januari 2018

				berpengaruh pada belanja modal. Untuk Pemerintah Kota Surakarta diharapkan untuk lebih memilih sumber alokasi pemerintah daerah pendapatan dan pengeluaran lokal sendiri diharapkan akan diutamakan dalam alokasi modal pengeluaran lebih efektif untuk meningkatkan layanan kepada publik.	
16	Dwi Purnamasari dan Isnaini Rodiyah (2017) Judul Penelitian : Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2010-2014.	Variabel Independen: Analisis Kemandirian Daerah	Variabel Independen:	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo yang berstatus masih rendah atau berada pada pola hubungan konsultatif. Rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio indeks kemampuan rutin yang menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang cukup. Pada rasio keserasian menunjukkan hasil belanja rutin lebih besar dari belanja pembangunan. Sedangkan rasio pertumbuhan, secara keseluruhan mengalami pertumbuhan yang negatif. Kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Sidoarjo masih rendah atau kurang.	Jurnal ISSN 2527-9246 Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol 5 No. 1 Maret 2017, Hal 75-92

17	Junita Putri R.H dan Murni D.N (2017) Judul Penelitian: Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Pada Kinerja Pemerintah Kota Medan.	Variabel Independen: Efektivitas, Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel Independen: Kinerja	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah kota Medan telah sangat independen dan sangat efektif dalam kinerja manajemen keuangan dan menjalankan roda pemerintah	Jurnal ISSN 2548-4923 Jurnal Administrasi Bisnis Vol 8 No. 1 Maret 2019 hal 9-14
18	Aris Rante, M. Saleh Mire dan Ardi Paminto (2017) Judul Penelitian : Analisis Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel Independen: Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel Independen: Belanja langsung dan Belanja Tidak Langsung	Analisis tersebut menemukan bahwa: Efek langsung Shop tidak signifikan terhadap PDB. Dampak langsung tidak secara signifikan terhadap PDB. Efek langsung Pemerintah Daerah secara langsung tidak signifikan terhadap PDB. Belanja Langsung dan Pengeluaran Tidak Langsung berdampak langsung secara signifikan pada Tingkat Desentralisasi Fiskal Efek Bersifat Ekuitas Daerah secara langsung tidak signifikan terhadap PDB Tingkat Desentralisasi Fiskal dan dampak langsung tidak signifikan terhadap tingkat Desentralisasi Fiskal di Malinau.	Jurnal ISSN Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen Vol 13 No.2 Tahun 2017
19	R. Neneng Rina A dan Nisa Noor W (2018) Judul Penelitian: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan	Variabel Independen: Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel Independen: PAD, Dana Perimbangan	Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa: (1) Pendapatan Asli Daerah, Dana	Jurnal ISSN 1907-9958 Jurnal Akuntansi Vol 13 No. 1 Januari-Juni 2018. Hal

	Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah			Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalami fluktuasi, (2) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, (3) Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, (4) Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	30-39
20	Jalu A. Prakoso, Fitrah Sari Islami dan Rr. Retno Sugiharti (2019) Judul Penelitian Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Jawa Tengah	Variabel Independen: Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel Independen: Kemampuan Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan.	Hasil analisis menyebutkan bahwa rasio kemampuan keuangan daerah sebagian besar berada dalam posisi sangat kurang dan hasil rasio kemandirian keuangan daerah sebagian berada dalam kondisi instruktif.	Jurnal ISSN 2508-0205 Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan
Abdul Hidayat (2020) 163403083					
A nalisis Efektivitas Belanja Pegawai Sebelum dan Sesudah Penerapan UU No. 23 Tahun 2014 serta Dampaknya Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah					

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mencoba melakukan penelitian mengenai “ANALISIS EFEKTIVITAS BELANJA PEGAWAI SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN UU NO. 23 TAHUN 2014 SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KEMANDIRIAN KUANGAN DAERAH”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan yang merupakan gambaran ruang lingkup penelitian yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Belanja Pegawai Sebelum Penerapan UU No. 23 Tahun 2014 pada Provinsi Jawa Barat.
2. Bagaimana Efektivitas Belanja Pegawai Sesudah Penerapan UU No. 23 Tahun 2014 pada Provinsi Jawa Barat.
3. Apakah Terdapat Perbedaan Tingkat Efektivitas Belanja Pegawai Sebelum dan Sesudah Penerapan UU No. 23 Tahun 2014 pada Provinsi Jawa Barat.
4. Bagaimana Pengaruh Efektivitas Belanja Pegawai Sebelum dan Sesudah Penerapan UU No. 23 Tahun 2014 terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Provinsi Jawa Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang di uraikan dalam rumusan permasalahan, maka yang akan menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk Mengetahui Efektivitas Belanja Pegawai Sebelum Penerapan UU No. 23 Tahun 2014 pada Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk Mengetahui Efektivitas Belanja Pegawai Sesudah Penerapan UU No. 23 Tahun 2014 pada Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk Mengetahui Ada Perbedaan Efektivitas Belanja Pegawai Sebelum dan Sesudah Penerapan UU No. 23 Tahun 2014 pada Provinsi Jawa Barat.

4. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Efektivitas Belanja Pegawai Sebelum dan Sesudah Penerapan UU No. 23 Tahun 2014 terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dapat dijadikan sebagai informasi dasar bagi semua pihak, serta sebagai rekomendasi kepada pemerintah dalam melihat Tingkat Efektivitas Belanja Pegawai serta Dampaknya Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat sebelum dan sesudah penerapan alih kewenangan tersebut.
2. Dapat dijadikan acuan bagi semua pihak terkait dalam melihat Tingkat Efektivitas Belanja Pegawai serta Dampaknya Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat sebelum dan sesudah penerapan alih kewenangan tersebut.
3. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan penelitian mengenai Efektivitas Belanja Pegawai Sebelum dan Sesudah Penerapan UU No. 23 Tahun 2014 serta Dampaknya Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Barat.
4. Bagi calon peneliti, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan Efektivitas Belanja Pegawai

serta Dampaknya terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Barat.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2019 yang data keuangannya dapat diakses melalui website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik.

1.5.2 Waktu Penelitian

Untuk memperoleh dan mengolah data/informasi yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, penulis telah melaksanakan penelitian selama 5 bulan yaitu dari bulan Februari 2020 sampai dengan Juni 2020. Untuk waktu penelitian terlampir.

